



Evaluasi laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Simalungun

Sahala Purba^{1*}, Maria Astuti Br Gurusinga², Wilfredo Nahulae³, Herlin Tresia Perbina Br Sitepu⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6512>

Abstract

Based on the following metrics: (1) Regional Financial Independence Ratio, (2) Regional Financial Dependency Ratio, (3) Fiscal Decentralization Degree Ratio, (4) Original Income Effectiveness Ratio Regional, (5) Regional Original Income Efficiency Ratio, (6) Regional Tax Effectiveness Ratio, (7) Regional Tax Efficiency Ratio, and (8) BUMD Contribution Degree Ratio, this study attempts to analyze the financial performance of the Simalungun Regency Government in the 2013–2022 budget year. Data was gathered using a sampling technique. The results of the analysis show that the Simalungun Regency has a low Regional Financial Independence Ratio, and the region still depends on the central government. The Regional Financial Dependency Ratio is relatively low, and Simalungun still depends on external parties. Moreover, The Ratio of the Degree of Fiscal Decentralization is classified as low; The Ratio of the Effectiveness of regional owned-sources Income is classified as less effective; The Regional owned-sources Income Efficiency Ratio is very efficient; Tax Effectiveness Ratio is classified as quite effective; The Regional Tax Efficiency Ratio is classified as very efficient, and The Ratio of the Degree of Contribution of Regional Owned enterprise is classified as low.

Keywords: Analysis of Financial Reports; Effectiveness Ratio and Regional Original Income; Financial Performance; Regional Owned-Source and Ratio Efficiency; Simalungun Regency Government.

Abstrak

Berdasarkan rasio sebagai berikut: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, (3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (4) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, (5) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, (6) Rasio Efektivitas Pajak Daerah, (7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah, dan (8) Rasio Derajat Kontribusi BUMD, Riset ini mencoba menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tahun anggaran 2013–2022. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Kabupaten Simalungun dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong rendah sekali, hal ini menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada pemerintah pusat (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tergolong sangat rendah menunjukkan masih ada nya ketergantungan dengan pihak eksternal (3) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tergolong kurang artinya daerah kurang optimal (4) Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten simalungun tergolong kurang efektif (5) Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sangat efisien (6) Rasio Efektifitas Pajak Daerah tergolong cukup efektif (7) Rasio Efisiensi Pajak Daerah tergolong sangat efisien dalam melakukan pengumpulan Pajak Daerah (8) Rasio Derajat Kontribusi BUMD tergolong berkontribusi rendah.

Kata Kunci: Analisis Laporan Keuangan; Efisiensi Rasio PAD; Kinerja Keuangan; Pemerintah Kabupaten Simalungun; Rasio Efektifitas dan Pendapatan Asli Daerah.

Riwayat artikel

Artikel masuk : 30 Mei 2024
Artikel direvisi : 4 Agustus 2024
Artikel diterima : 4 Agustus 2024

*Email korespondensi: sahalas24@gmail.com

PENDAHULUAN

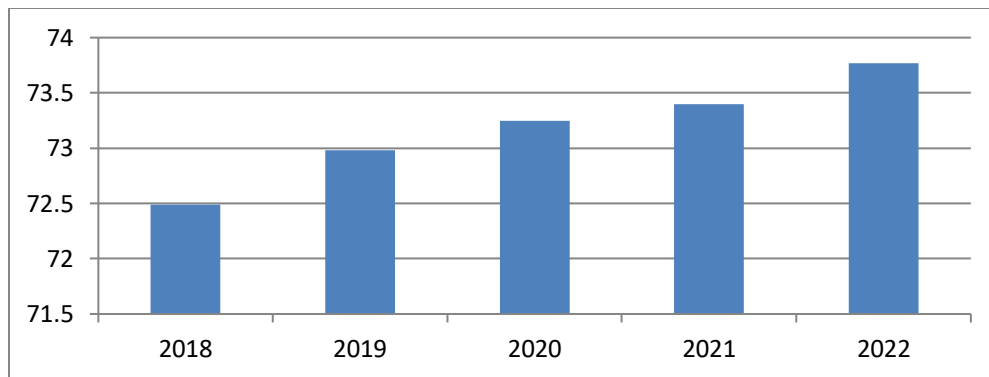
Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah harus efektif dan efisien dalam roda pemerintahannya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengoptimalkan potensi daerah. Otonomi daerah sebagai konsep pembangunan memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang semakin dituntut seiring dengan peningkatan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Meskipun dana perimbangan dari pemerintah pusat cukup memadai, pemerintah daerah harus tetap kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD serta memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka. Oleh karena itu, daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber-sumber PAD secara maksimal. Salah satu keberhasilan dalam praktek otonomi daerah berasal dari kerja keras Pemda dalam berupaya melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum (Susilawati & Wardana, 2018).

Alasan dilakukannya analisis laporan keuangan pada Kabupaten Simalungun untuk mengkaji lebih dalam pengelolaan anggaran yang dibuat pemerintah Kabupaten Simalungun dalam membangun dan memajukan daerah Kabupaten Simalungun. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembaca dengan menaikkan nilai transparansi serta tanggung jawab pengendalian keuangan daerah Simalungun. Dengan menyajikan data yang akurat dan analisis yang mendalam, penelitian ini membantu pembaca memahami bagaimana dana daerah digunakan dan dikelola. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif para pembaca dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait anggaran dan pengeluaran daerah Simalungun. Selain itu, hasil riset ini dapat dipakai untuk alat edukasi para pembaca agar lebih melek finansial dan memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien demi kesejahteraan bersama.

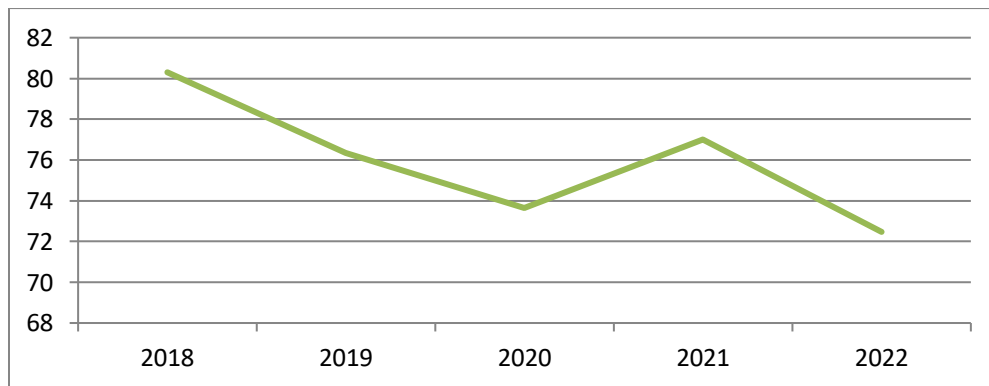
Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Simalungun. Setiap negara atau daerah akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto (PDB), baik atas



dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selain itu, pencapaian kinerja makro juga dapat dilihat dampak pembangunan pada pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) (BPK, 2022). Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Simalungun terus mengalami kemajuan. IPM Simalungun meningkat dari 72,49 pada 2018 menjadi 73,77 pada 2022. Selama periode tersebut, IPM Simalungun rata-rata tumbuh sebesar 0,56% per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” sejak 2013. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Simalungun. IPM 2021 tercatat sebesar 73,40 atau tumbuh 0,20%, melambat dibandingkan pertumbuhan IPM 2020. Namun demikian, setelah satu tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, IPM mulai mengalami percepatan di 2022 (BPS, 2022).



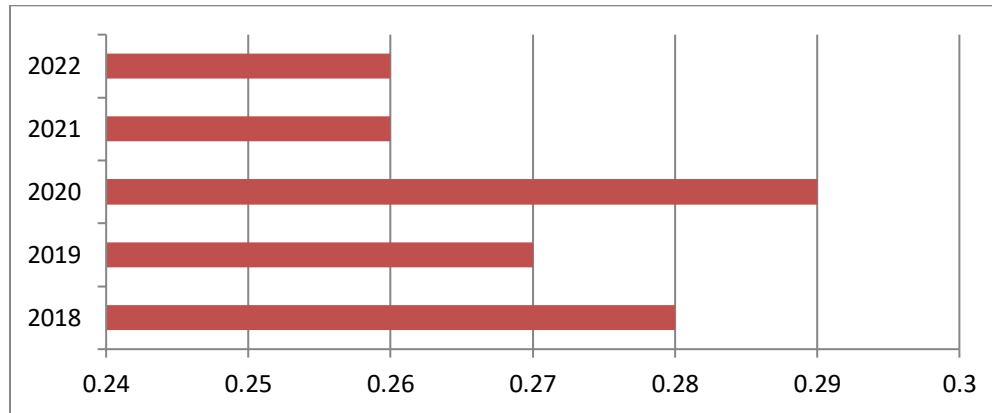
Gambar 1. IPM Simaulungun Tahun 2018 – 2022
Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2024



Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin Simalungun 2018-2022
Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2024

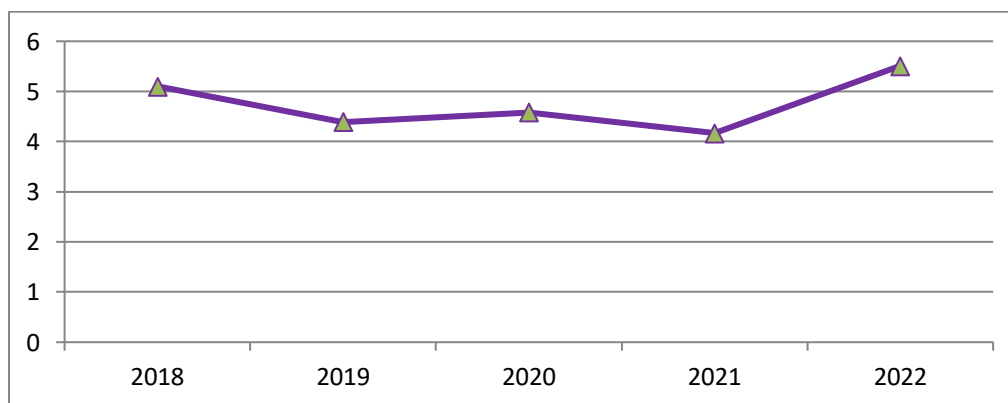
Indikator kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Untuk mengukur keadaan kemiskinan, Badan pusat statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar pemerintah kabupaten Simalungun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 mencapai 72,47 ribu menurun dari tahun 2021 sebesar 76,99 ribu. Berdasarkan produk Capaian PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Simalungun tahun 2022 sebesar Rp29,990 Triliun (BPK, 2022).



Gambar 3. Gini Ratio Simalungun Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2024

Secara umum, nilai *Gini Ratio* Kabupaten Simalungun selama periode 2018 hingga 2022 mengalami *trend series* yang menurun. Namun pada 2020 mengalami kenaikan yang cukup besar yakni 0,29. Pada 2021, *Gini Ratio* Kabupaten Simalungun menurun drastis mencapai 0,26 hingga kondisi 2022 (Sri Hartati, 2022).



Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Simalungun 2018-2022
Sumber: BPS Kabupaten Simalungun, 2024

Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Simalungun mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2019-2021 tingkat pengangguran terbuka di

Kabupaten Simalungun berturut-turut mengalami penurunan. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka daerah tersebut naik menjadi 5,51. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin baik itu ketika mengalami penurunan dan kenaikan (Richter et al., 2016).

Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Simalungun, 25.114 orang (Siahaan, 2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Simalungun turun menjadi 17,4%, sebelumnya masih bertengger di 28% (Iskandar, 2023). Mengutip data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,46% dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,81% dan pada tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 8,26% (Manurung, 2023). Dalam refleksi selama tahun 2023 ini, Polres Simalungun menangani 2.911 kasus jumlah kejahatan dan menyelesaikan 2.016 kasus yang dimana mengalami kenaikan sekitar 69% dari tahun 2022. Selain itu, tren kasus menonjol sebanyak 575 mengalami kenaikan 63.35%, tren kasus atensi pimpinan sebanyak 542 mengalami kenaikan 58,48% dari tahun 2022 (Ahad, 2023). Pengeluaran pemerintah dapat dikategorikan menggunakan dua kategori teori, yakni teori makro serta teori mikro. Teori makro terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu pembayaran gaji, pembayaran *transfer*, dan pengeluaran pemerintah untuk penyediaan barang dan jasa. Teori mikro, di sisi lain, berkaitan dengan pengujian variabel-variabel yang mempengaruhi ketersediaan dan permintaan barang publik. Sasaran kesejahteraan masyarakat menjadi fokus rancangan kerja tahunan pemda dan APBD, keduanya menuntut pembayaran tunai. Secara umum, konsumsi dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan, dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi maka barang yang dikonsumsi akan berkualitas lebih tinggi (Tarigan et al., 2023).

TELAAH TEORETIS

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator keahlian pemerintah daerah membelanjai pelayanan publik, pembangunan, serta operasional pemerintahan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan total pinjaman dan bantuan pemerintah pusat untuk menghitung pengukuran ini (Bisma & Susanto, 2010). Ukuran otonomi keuangan daerah menaik sejalan



dengan meningkatnya otonomi keuangan daerah (Halim, 2012). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dihitung berdasarkan formula (1).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Total PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini mencocokkan Pendapat Asli Daerah (PAD) yang diterima suatu wilayah dengan total pendapatan daerah tersebut (Widodo, 2021). Semakin besar rasionya, semakin tinggi ketergantungan pemda pada pemerintah pusat (Mahmudi, 2016). Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan formula (2).

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100 \dots\dots\dots (2)$$

Rasio Ukuran Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkatan sejauh mana otoritas dan wewenang yang dikasih pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Dalam penelitian ini skala desentralisasi fiskal dinilai melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (Bisma & Susanto, 2010). Kesiapan Pemda untuk melaksanakan desentralisasi menaik seiring pada meningkatnya peran PAD (Bisma Susanto, 2010). Tingkat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan formula (3).

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Statistik berikut melampirkan kemahiran pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan daerah yang disusun semula, dilaksanakan pada tujuan yang ditetapkan menurut potensi daerah yang sebenarnya (Widodo, 2021). Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung berdasarkan formula (4).

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indeks ini menyatakan kesiapan Pemda dalam mencapai rencana pembangunan proyek yang disusun dicocokkan dengan tujuan yang disahkan berlandaskan kapasitas riil daerah. Semakin bawah indeks efisiensi, semakin bagus kinerja Pemda (Maulina, 2020). Pemda akan



efektif dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah saat jumlah rasio ini lebih rendah (Halim, 2012). Tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dihitung berdasarkan formula (5).

$$\text{Rasio Keefisienan PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas fiskal daerah menggambarkan kesiapan Pemda untuk memungut pajak berdasarkan target penerimaan pajak daerah (Puspitasari & Rohman, 2014). Kinerja pemda untuk menyatukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi sesuai anggaran meningkat seiring dengan peningkatan efektivitas (Mahmudi, 2016). Tingkat Efektivitas Pajak Daerah dihitung berdasarkan formula (6).

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi fiskal berkaitan pada pemungutan anggaran terhadap realisasi penerimaan pajak daerah (Puspitasari & Rohman, 2014). Peforma administrator daerah otonom dianggap cukup lebih efisien kalau kinerjanya 10% maupun lebih di bawah rata-rata (Mahsun, 2019). Tingkat Efisiensi Pajak Daerah dihitung berdasarkan formula (7).

$$\text{Rasio Keefisienan Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (7)$$

Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini membandingkan keuntungan BUMD dengan realisasi PAD untuk mengukur tingkat kontribusi BUMN terhadap penunjang pemasukan daerah. Semakin besar rasionya maka akan besar pula partisipasi perusahaan daerah terhadap peningkatan PAD (Widodo, 2021). Tingkat Derajat Kontribusi BUMD dihitung berdasarkan formula (8).

$$\text{Rasio Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Laba BUMD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

METODE

Populasi penelitian ini meliputi laporan jumlah bahan PDRB, belanja daerah, serta realisasi pemakaian APBD Simalungun. Sampel penelitian memanfaatkan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel menurut kriteria atau kepentingan tertentu. Data sampel diperoleh melalui Kantor Statistik Simalungun, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Simalungun, Dinas Pendapatan Simalungun, serta dari Bappeda Simalungun.



Peneliti memilih Kabupaten Simalungun untuk diteliti karena daerah ini memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang unik, potensi pariwisata yang besar dibuktikan dengan lokasi yang dekat dengan objek wisata yang terkenal yaitu Danau Toba, serta perkembangan ekonomi yang menarik untuk dianalisis. Pemilihan Kabupaten Simalungun sebagai objek penelitian diinginkan agar memberikan kontribusi yang baik dalam memahami hubungan antara PDRB, belanja daerah, dan realisasi penggunaan APBD, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Adapun parameter yang menjadi acuan atau tolok ukur dalam melakukan analisis laporan keuangan ini adalah:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkatan	Keterangan	Pola Hubungan
0 - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25 - 50%	Rendah	Konstruksif
50 - 75%	Sedang	Parsipatif
75 - 100%	Tinggi	Delegatif

Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkatan	Keterangan
0 – 10%	Rendah sekali
10 – 20%	Rendah
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup
40 – 50%	Tinggi
>50%	Tinggi sekali

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Tingkatan	Keterangan
0 – 10%	Kurang sekali
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup
40 – 50%	Baik
>50%	Baik sekali

Tabel 4. Kriteria Penilaian Tingkat Efektifitas PAD

Tingkatan	Keterangan
Up 100%	Efektif Sekali
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Lumayan Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif



Tabel 5. Kriteria Penilaian Tingkat Efisiensi PAD

Tingkatan	Keterangan
>40%	Sangat Tidak Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
10% - 20%	Efisien
<10%	Sangat Efisien

Tabel 6. Kriteria Penilaian Efektifitas Pajak Daerah

Tingkatan	Keterangan
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<10%	Tidak Efektif

Tabel 7. Kriteria Penilaian Tingkat Efisiensi Pajak Daerah

Tingkatan	Keterangan
<10%	Sangat Efisien
10-20%	Efisien
21 – 30%	Cukup Efisien
31-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Tabel 8. Kriteria Penilaian Derajat Kontribusi BUMD

Tingkatan	Keterangan
<0%	Tidak Berkontribusi
0-10%	Berkontribusi Rendah Sekali
10-30%	Berkontribusi Rendah
31-40%	Cukup Berkontribusi
41-50%	Berkontribusi Tinggi
>50%	Berkontribusi Sangat Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil riset mengungkapkan bahwa angka rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun tahun 2013-2022 cenderung menghadapi peningkatan. Terlihat bahwa pada tahun 2014, kemandirian keuangan daerah mencapai titik terendah sebesar 6,33%, sedangkan pada tahun 2017 mencapai titik tertinggi dengan nilai 14,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dalam membiayai kebutuhannya dari pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi signifikan selama periode

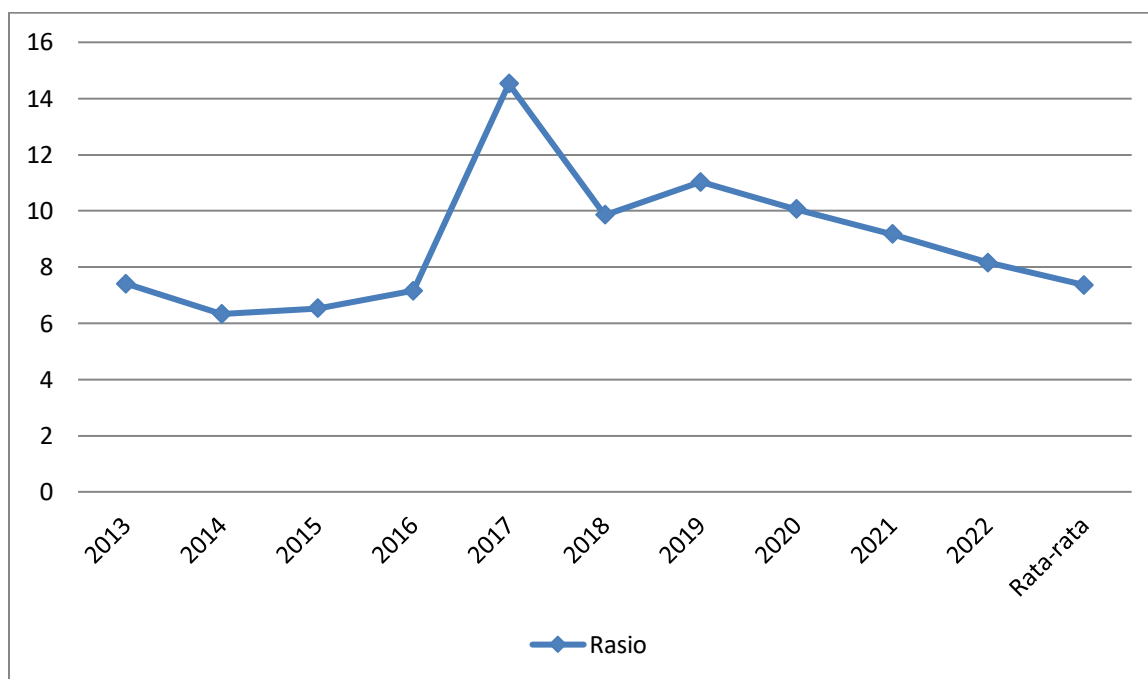


tersebut. Peningkatan rasio kemandirian di tahun 2017 menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Periode	Realisasi Total PAD	Pendapatan Transfer	Rasio (%)	Keterangan	Pola Hubungan
2013	97.914.775.900,50	1.321.710.680.505,00	7,40 %	Rendah Sekali	Instruktif
2014	96.390.208.715,29	1.522.430.664.101,00	6,33%	Rendah Sekali	Instruktif
2015	111.893.282.770,10	1.713.180.635.375,00	6,53%	Rendah Sekali	Instruktif
2016	132.560.800.825,92	1.853.829.139.656,00	7,15%	Rendah Sekali	Instruktif
2017	252.663.015.526,86	1.739.448.406.826,00	14,52%	Rendah Sekali	Instruktif
2018	164.107.850.129,30	1.664.838.039.794,00	9,85%	Rendah Sekali	Instruktif
2019	191.940.130.095,11	1.739.248.224.274,00	11,03%	Rendah Sekali	Instruktif
2020	159.319.208.782,63	1.582.524.160.241,00	10,06%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	177.646.004.173,82	1.935.652.234.236,00	9,17%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	174.521.883.377,86	2.138.243.142.483,00	8,16%	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-Rata	155.895.716.029,74	1.721.110.532.749,10	9,02%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: Informasi Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024



Gambar 5. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

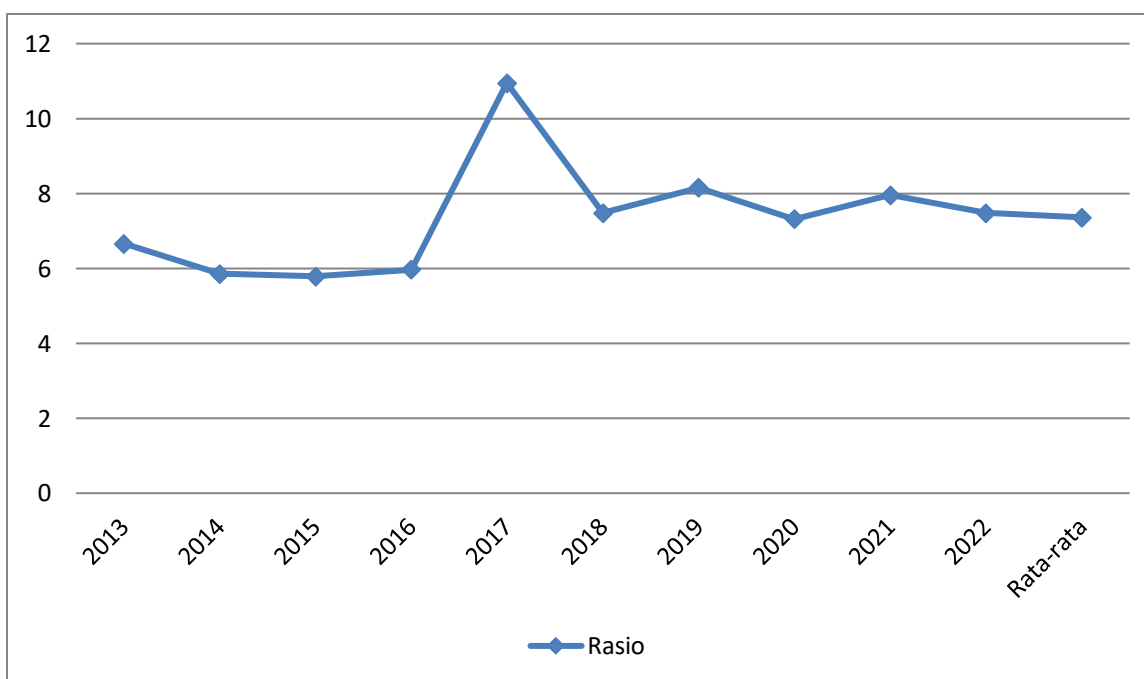
Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Rasio Kergantungan Keuangan Daerah**Tabel 2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

Periode	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Keterangan
2013	97.914.775.900,50	1.468.168.468.505,50	6,66%	Sangat Rendah
2014	96.390.208.715,29	1.644.477.022.617,29	5,86%	Sangat Rendah
2015	111.893.282.770,10	1.930.943.305.381,10	5,79%	Sangat Rendah
2016	132.560.800.825,92	2.218.572.431.172,92	5,97%	Sangat Rendah
2017	252.663.015.526,86	2.302.692.922.207,86	10,95%	Rendah
2018	164.107.850.129,30	2.193.012.743.922,30	7,48%	Sangat Rendah
2019	191.940.130.095,11	2.354.406.284.384,11	8,15%	Sangat Rendah
2020	159.319.208.782,63	2.175.717.502.483,16	7,32%	Sangat Rendah
2021	177.646.004.173,82	2.230.846.393.191,82	7,96%	Sangat Rendah
2022	174.521.883.377,86	2.331.760.427.077,86	7,48%	Sangat Rendah
Rata-Rata	155.895.716.029,74	2.085.059.750.094,39	7,36%	Sangat Rendah

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Riset ini menunjukkan nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Simalungun dari tahun 2013 hingga 2022 cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan keuangan daerah mencapai puncak tertinggi sebesar 10,97%, sedangkan pada tahun 2015 mencapai titik terendah dengan nilai 5,79%.

**Gambar 6. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah**

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

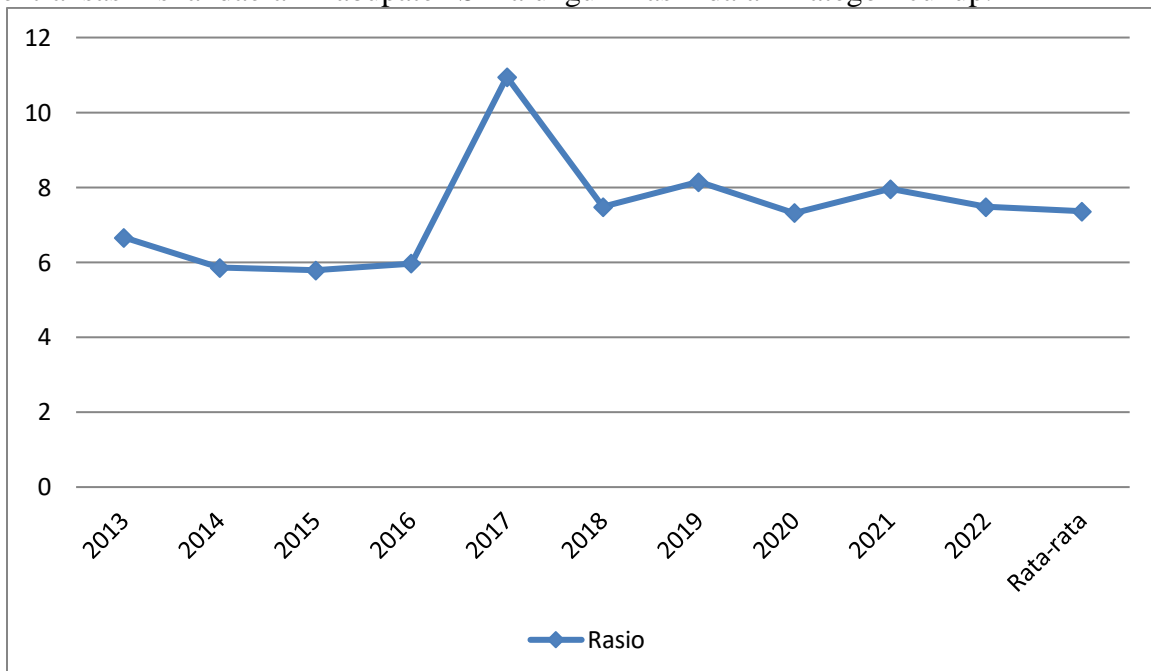


*Rasio Ukuran Desentralisasi Fiskal***Tabel 3. Tingkat Ukuran Desentralisasi Fiskal**

Periode	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Keterangan
2013	97.914.775.900,50	1.468.168.468.505,50	6,66%	Sangat Kurang
2014	96.390.208.715,29	1.644.477.022.617,29	5,86%	Sangat Kurang
2015	111.893.282.770,10	1.930.943.305.381,10	5,79%	Sangat Kurang
2016	132.560.800.825,92	2.218.572.431.172,92	5,97%	Sangat Kurang
2017	252.663.015.526,86	2.302.692.922.207,86	10,97%	Kurang
2018	164.107.850.129,30	2.193.012.743.922,30	7,48%	Sangat Kurang
2019	191.940.130.095,11	2.354.406.284.384,11	8,15%	Sangat Kurang
2020	159.319.208.782,63	2.175.717.502.483,16	7,32%	Sangat Kurang
2021	177.646.004.173,82	2.230.846.393.191,82	7,96%	Sangat Kurang
2022	174.521.883.377,86	2.331.760.427.077,86	7,48%	Sangat Kurang
Rata-Rata	155.895.716.029,74	2.085.059.750.094,39	7,36%	Sangat Kurang

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Simalungun dari tahun 2013 hingga 2022 cenderung meningkat setiap tahunnya. Puncak tertinggi rasio derajat desentralisasi fiskal terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 10,97%, sedangkan terendah tercatat pada tahun 2015 sebesar 5,79%. Namun, pada tahun 2018, terjadi penurunan signifikan dari 10,97% menjadi 7,48%, menandakan penurunan sebesar 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, rata-rata hasil rasio derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Simalungun masih dalam kategori cukup.

**Gambar 7. Tingkat Desentralisasi Fiskal**

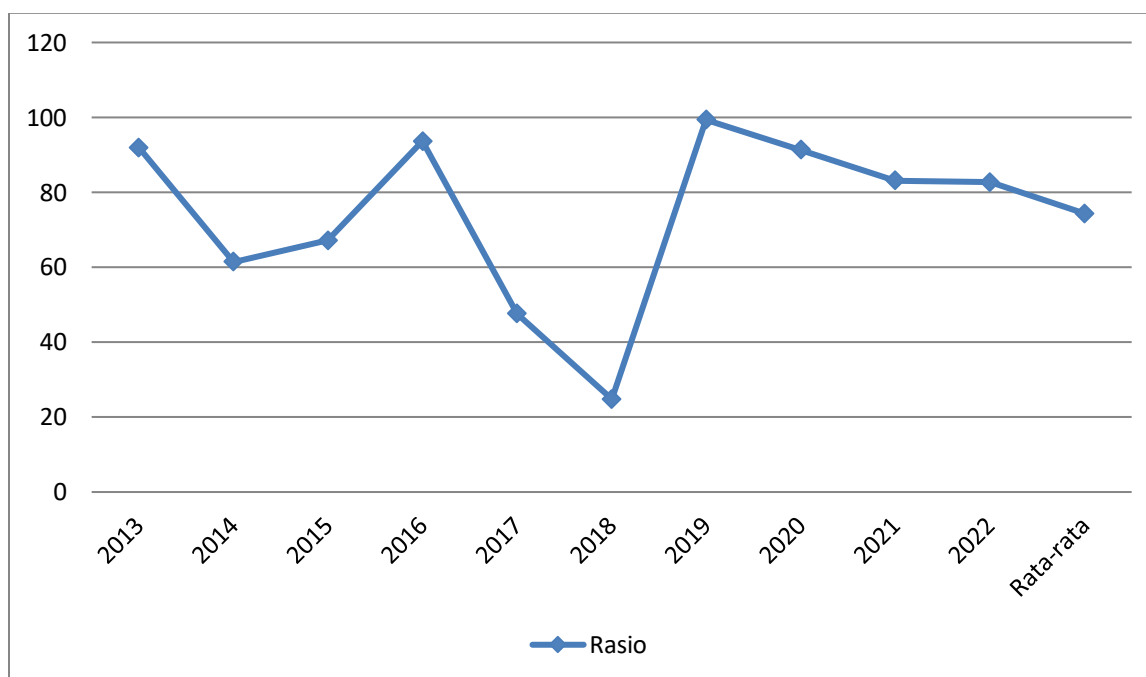
Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**Tabel 4. Rasio Efektifitas PAD**

Periode	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio (%)	Keterangan
2013	97.914.775.900,50	106.480.330.334,00	91,95	Efektif
2014	96.390.208.715,29	156.842.990.032,00	61,45	Kurang Efektif
2015	111.893.282.770,10	166.632.299.054,77	67,14	Kurang Efektif
2016	132.560.800.825,92	141.539.527.539,00	93,65	Efektif
2017	252.663.015.526,86	531.360.211.167,00	47,55	Tidak Efektif
2018	164.107.850.129,30	661.815.202.074,00	24,79	Tidak Efektif
2019	191.940.130.095,11	193.190.820.600,00	99,35	Efektif
2020	159.319.208.782,63	174.463.005.500,00	91,31	Efektif
2021	177.646.004.173,82	213.742.072.226,67	83,11	Cukup Efektif
2022	174.521.883.377,86	210.939.762.089,00	82,73	Cukup Efektif
Rata-Rata	155.895.716.029,74	255.700.622.061,64	74,30%	Kurang Efektif

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rasio efektivitas PAD Kabupaten Simalungun dari tahun 2013 hingga 2022 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Puncak tertinggi rasio efektivitas PAD terjadi tahun 2019 dengan nilai 99,35%, sementara terendah tercatat tahun 2018 sebesar 24,79%. Terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, yaitu sebesar 74,56%. Meskipun nilai efektivitas PAD fluktuatif, rata-rata nilai rasio efektivitas PAD Kabupaten Simalungun di simpulkan dalam klasifikasi kurang efektif.

**Gambar 8. Tingkat Efektivitas PAD**

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

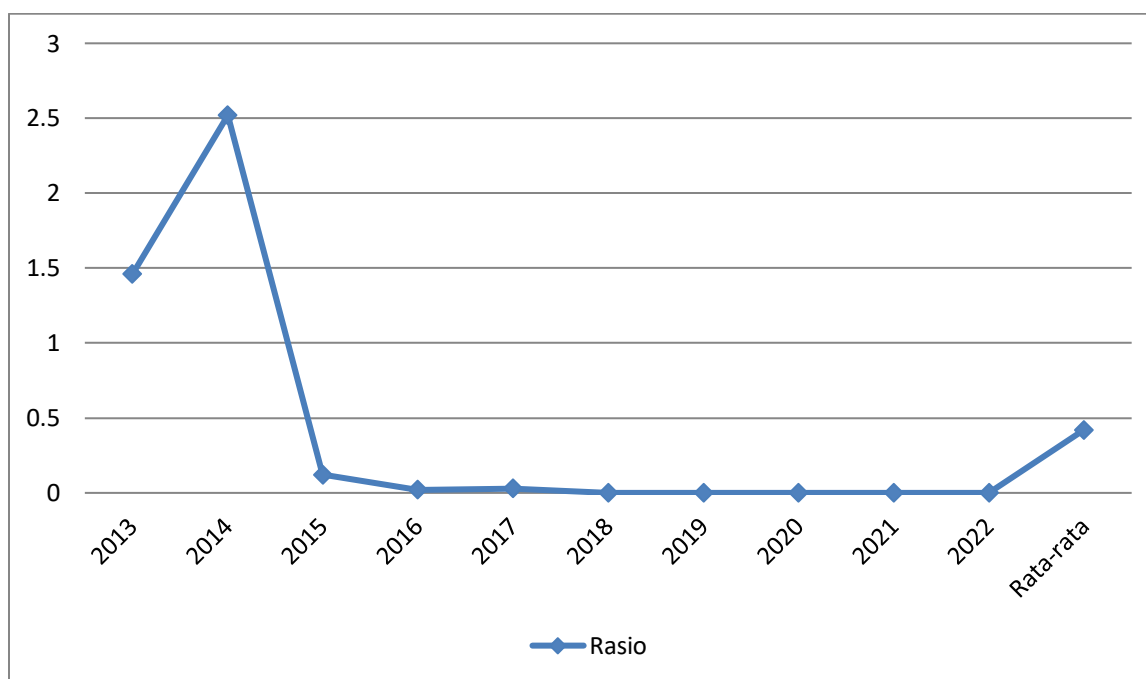
Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Hasil riset melampirkan bahwa angka rasio efisiensi PAD Kabupaten Simalungun dari tahun 2013 hingga 2022 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan terjadi peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Titik tertinggi rasio efisiensi PAD tercatat pada 2019 dengan nilai 99,35%, sedangkan terendah terjadi pada 2018 sebesar 24,79%. Meskipun nilai efisiensi PAD fluktuatif, namun secara keseluruhan rata-rata nilai rasio efisiensi PAD Kabupaten Simalungun termasuk dalam kategori sangat efisien.

Tabel 5. Rasio Efisiensi PAD

Periode	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio (%)	Keterangan
2013	1.429.886.335,00	97.914.775.900,50	1,46%	Sangat Efisien
2014	2.433.425.365,00	96.390.208.715,29	2,52%	Sangat Efisien
2015	141.768.554,00	111.893.282.770,10	0,12%	Sangat Efisien
2016	37.028.581,00	132.560.800.825,92	0,02%	Sangat Efisien
2017	80.000.000,00	252.663.015.526,86	0,03%	Sangat Efisien
2018	0,00	164.107.850.129,30	0,00%	Sangat Efisien
2019	0,00	191.940.130.095,11	0,00%	Sangat Efisien
2020	0,00	159.319.208.782,63	0,00%	Sangat Efisien
2021	0,00	177.646.004.173,82	0,00%	Sangat Efisien
2022	0,00	174.521.883.377,86	0,00%	Sangat Efisien
Rata-Rata	412.210.883,50	155.895.716.029,74	0,42%	Sangat Efisien

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024



Gambar 9. Tingkat Efisiensi PAD

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

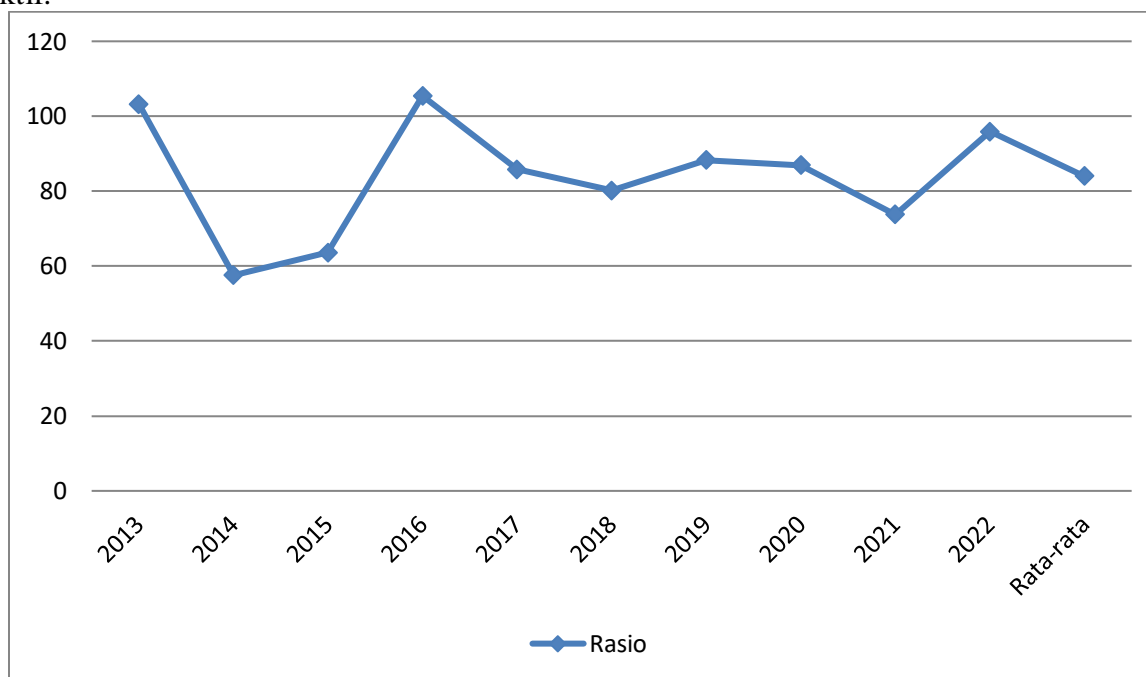


*Rasio Efektifitas Pajak Daerah***Tabel 6. Rasio Efektifitas Pajak Daerah**

Periode	Realisasi Pajak Daerah	Pajak Daerah	Rasio (%)	Keterangan
2013	32.401.864.271,40	31.377.094.896,00	103,26%	Sangat Efektif
2014	44.075.875.456,60	76.582.094.896,00	57,55%	Tidak Efektif
2015	54.262.759.144,00	85.304.170.129,74	63,61%	Kurang Efektif
2016	62.068.075.328,50	58.860.370.419,00	105,44%	Sangat Efektif
2017	72.383.068.162,86	84.350.000.000,00	85,81%	Cukup Efektif
2018	79.357.802.640,00	98.950.000.000,00	80,19%	Cukup Efektif
2019	85.226.198.303,00	96.500.000.000,00	88,31%	Cukup Efektif
2020	86.048.797.782,63	99.000.000.000,00	86,91%	Cukup Efektif
2021	88.270.308.014,00	119.708.721.746,00	73,73%	Kurang Efektif
2022	102.714.047.044,00	107.893.257.463,00	95,19%	Efektif
Rata-Rata	70.680.879.614,70	85.852.570.954,97	84,00%	Cukup Efektif

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Hasil riset melampirkan bahwa angka rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Simalungun dari tahun 2013 hingga 2022 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan beberapa peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Puncak tertinggi rasio efektifitas pajak daerah terjadi pada tahun 2016 dengan nilai 105,44%, mengalami kenaikan sebesar 41,83% daripada tahun sebelumnya. Di sisi lain, nilai rasio terendah tercatat pada tahun 2014 dengan nilai 57,55%. Meskipun nilai efektifitas pajak daerah cukup fluktuatif, namun rata-rata nilai rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Simalungun masih termasuk dalam kategori cukup efektif.

**Gambar 10. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah**

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

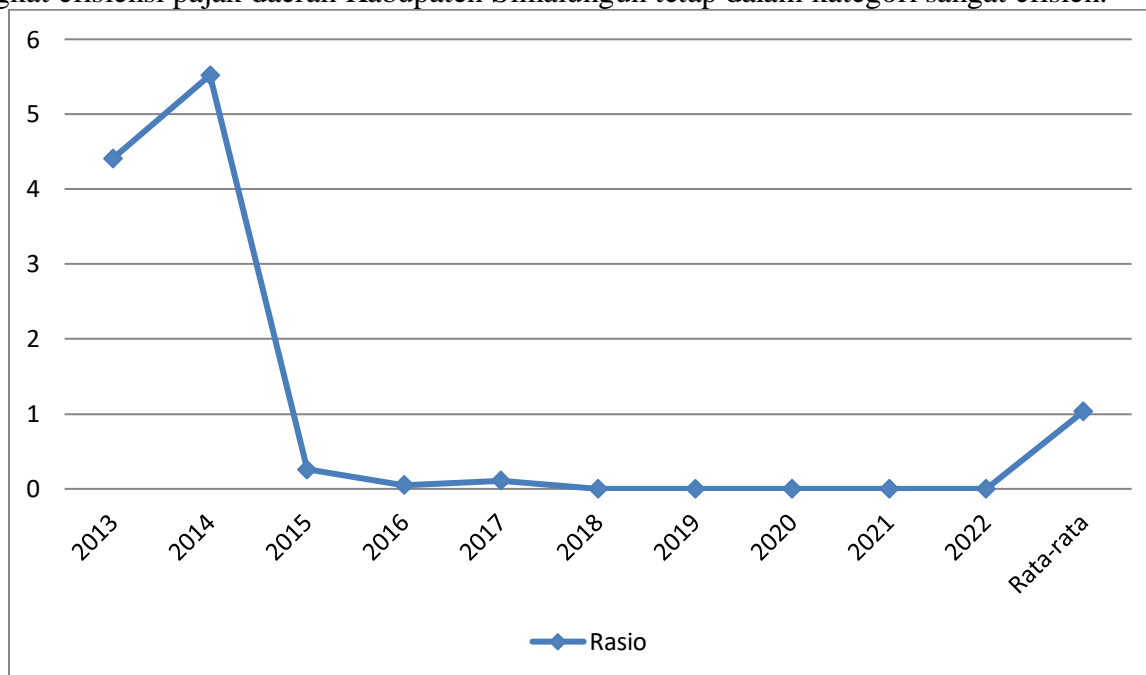


*Rasio Efisiensi Pajak Daerah***Tabel 7. Rasio Efisiensi Pajak Daerah**

Periode	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio (%)	Keterangan
2013	1.429.886.335,00	32.401.864.271,40	4,41%	Sangat Efisien
2014	2.433.425.365,00	44.075.875.456,60	5,52%	Sangat Efisien
2015	141.768.554,00	54.262.759.144,00	0,26%	Sangat Efisien
2016	37.028.581,00	62.068.075.328,50	0,05%	Sangat Efisien
2017	80.000.000,00	72.383.068.162,86	0,11%	Sangat Efisien
2018	-	79.357.802.640,00	-	
2019	-	85.226.198.303,00	-	
2020	-	86.048.797.782,63	-	
2021	-	88.270.308.014,00	-	
2022	-	102.714.047.044,00	-	
Rata-Rata	412.210.883,50	70.680.879.614,70	1,03%	Sangat Efisien

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Hasil riset menunjukkan nilai rasio efisiensi pajak daerah Simalungun dari tahun 2013 hingga 2022 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan beberapa peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Titik tertinggi rasio efisiensi pajak daerah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 5,52%, mengindikasikan tingkat efisiensi terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai rasio efisiensi pajak daerah terendah tercatat dari tahun 2018 hingga 2022, yaitu sebesar 0% menunjukkan tingkat efisiensi tertinggi. Meskipun terdapat peningkatan nilai rasio efisiensi pajak daerah, namun secara keseluruhan tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Simalungun tetap dalam kategori sangat efisien.

**Gambar 11. Tingkat Efisiensi Pajak Daerah**

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024



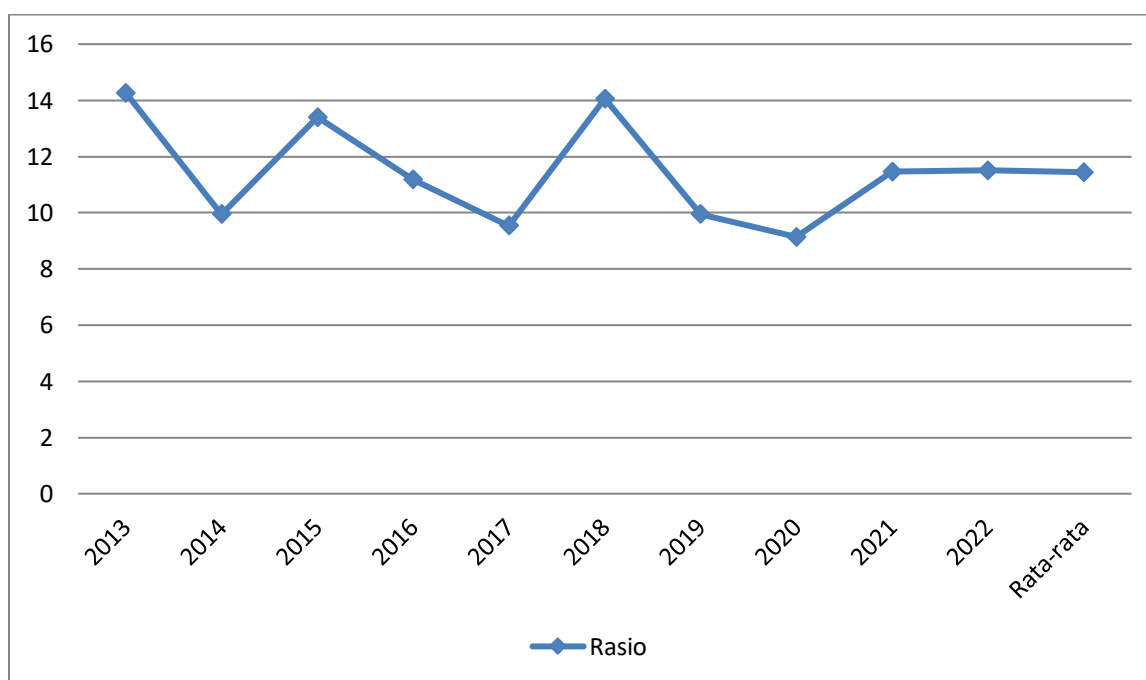
Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Hasil riset mengungkapkan angka rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten Simalungun dari tahun 2013 hingga 2022 cenderung menurun. Puncak tertinggi rasio derajat kontribusi BUMD terjadi tahun 2013 dengan nilai 14,26%, sedangkan terendah tercatat pada tahun 2017 sebesar 9,53%. Secara keseluruhan, rasio derajat kontribusi BUMD Simalungun dari 2013 hingga 2022 dapat dikatakan cukup rendah.

Tabel 8. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

Periode	Laba BUMD	Realisasi PAD	Rasio (%)	Keterangan
2013	13.969.714.291,00	97.914.775.900,50	14,26%	Berkontribusi Rendah
2014	9.590.065.221,00	96.390.208.715,29	9,94%	Berkontribusi Rendah Sekali
2015	14.986.292.104,00	111.893.282.770,10	13,39%	Berkontribusi Rendah
2016	14.827.261.760,00	132.560.800.825,92	11,18%	Berkontribusi Rendah
2017	24.093.355.940,00	252.663.015.526,86	9,53%	Berkontribusi Rendah Sekali
2018	23.081.632.302,00	164.107.850.129,30	14,06%	Berkontribusi Rendah
2019	19.088.536.501,00	191.940.130.095,11	9,94%	Berkontribusi Rendah Sekali
2020	14.573.946.375,00	159.319.208.782,63	9,14%	Berkontribusi Rendah Sekali
2021	20.363.527.228,00	177.646.004.173,82	11,46%	Berkontribusi Rendah
2022	20.095.654.771,00	174.521.883.377,86	11,51%	Berkontribusi Rendah
Rata-Rata	17.466.998.649,30	155.895.716.029,74	11,44%	Berkontribusi Rendah

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

**Gambar 12. Tingkat Kontribusi BUMD**

Sumber: Informasi data Laporan Keuangan Simalungun setelah Pemeriksaan BPK Sumut, 2024

Pembahasan

Dalam rentang waktu 2013–2022, Kabupaten Simalungun menunjukkan tingkat rata-rata rasio sebesar 9,02% mencerminkan tingkat kemandirian daerah sangat rendah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah, hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menggalih potensi alam yang ada di kabupaten tersebut, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zukhri, 2020) dan (Silitonga et al., 2022) Statistik otonom di Kepulauan Bangka Belitung serta Langkat yang diriset kecil sekali. Pada periode yang persis, Kabupaten Simalungun memperlihatkan tingkat ketergantungan finansial rendah, di tunjukkan nya rata-rata rasio sebesar 7,36%, yang menunjukkan ketergantungan yang sangat kecil terhadap pihak lain.

Dari hasil analisis *SWOT*, rasio kemandirian masuk kategori *weaknesses*. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan pemeritah daerah terhadap pemerintah pusat. Nilai rasio ketergantungan daerah cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Riset ini selaras pada temuan (Nasution, 2022) dan (Sari & Yousida, 2019) telah menunjukkan Pemda Samosir dan Tanah Bumbu tetap tergantung kepada pusat. Selama periode yang sama, tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Simalungun menunjukkan kontribusi yang minim, dengan rata-rata rasio sebesar 7,36%, yang menampilkan bahwa kemahiran Kabupaten Simalungun dalam mengelola dan memaksimalkan pendapatan masih terbatas serta memiliki kesulitan dalam mengelola sumber daya dan anggaran secara mandiri. Pengungkapan ini sejalan bersama (Latifatus Sakinah, 2021) menyatakan empat wilayah di kabupaten Madura kurang cukup pada hal desentralisasi fiskal.

Selama tahun 2013–2022, tingkat keefektifan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun memiliki rata-rata rasio sebesar 64,30%, mengindikasikan kemampuan yang kurang efektif dalam mewujudkan penghasilan asli wilayah sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill wilayah. Kurangnya efektivitas dalam mencapai target PAD ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya optimalisasi potensi alam, administrasi pajak yang belum maksimal, serta kurangnya inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru, pemerintah perlu meningkatkan strategi dalam memaksimalkan penerimaan PAD, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan efesiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Riset ini searah dengan temuan (Nurul Sukma



Handayani, 2019) dan (Reza Vendra, 2017) yang menunjukkan bahwa statistik efektivitas di wilayah Kalimantan Timur serta Sleman yang mereka teliti ikut berposisi tempat kurang efektif.

Sementara di sisi lain, rasio efisiensi PAD Kabupaten Simalungun sepanjang waktu yang serupa menunjukkan statistik efisiensi yang sangat tinggi, menunjukkan rata-rata rasio sebesar 74,30%, menyatakan prestasi yang sangat efisien pada hal pemungutan PAD. Hal ini juga konsisten dengan hasil penelitian (Latifatus Sakinah, 2021) dan (Pramono, 2014) yang mengatakan bahwa tingkat efisiensi PAD pada daerah Kabupaten Madura yang diteliti juga sangat efisien. Di sisi lain, Rasio Keefektifan Pajak Daerah wilayah Kabupaten Simalungun selama tahun 2013 -2022 mempunyai rata-rata sebesar 84,00% tetapi belum ada keterangan lanjutan dalam terkait dampaknya. Angka ini menunjukkan bahwa upaya Pemda dalam mendapatkan pajak daerah sudah cukup efektif. Keefektifan ini mencerminkan bahwa mekanisme dan sistem pengumpulan pajak sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam hal perluasan dasar pajak dan penambahan ketaatan wajib pajak. Pernyataan ini konsisten dengan temuan (Sucianti et al., 2022) dan (Yoduke & Ayem, 2016) menyebutkan efektivitas pajak daerah di wilayah Enrekang dan wilayah Bantul telah tercapai dengan baik.

Pada periode 2013–2022, rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Simalungun menunjukkan rata-rata rasio sebesar 1,03%, yang menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi dalam pengambilan pajak daerah. Kinerja Kabupaten Simalungun sangat efisien, menunjukkan bahwa administrasi dan pengelolaan pajak daerah dilakukan dengan sangat baik, dengan sedikit kebocoran dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Pernyataan ini juga sejalan dengan temuan (Zukhri, 2020) yang mengatakan bahwa efisiensi fiskal di daerah Kepulauan Bangka Belitung tinggi sekali. Di sisi lain, rasio kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Simalungun sepanjang tahun yang sama menunjukkan statistik sebesar 11,44%, yang menunjukkan rendahnya kontribusi perusahaan terhadap pendapatan pemerintah Kabupaten Simalungun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Simalungun belum memanfaatkan BUMD secara ideal untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun Kabupaten Simalungun terletak strategis dekat dengan objek wisata Danau Toba dan merupakan daerah penghasil tanaman pangan.



SIMPULAN

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Simalungun tahun 2013–2022 menunjukkan nilai rata-rata rasio sebesar 9,02% sehingga dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah sekali. Rasio ketergantungan keuangan daerah Simalungun periode 2013–2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 7,36% sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah rendah sekali. Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Simalungun periode 2013–2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 7,36% sehingga dapat dikatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal masuk dalam kategori rendah sekali. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Simalungun tahun 2013–2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 64,30% dan masuk dalam kategori kurang efektif. Rasio efisiensi PAD Kabupaten Simalungun tahun 2013–2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 74,36% dan masuk dalam kategori sangat efisien. Rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Simalungun tahun 2013–2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 84,00% dan masuk dalam kategori cukup efektif. Membuat rasio efektifitas pajak daerah tergolong dalam kekuatan Pemerintah Kabupaten Simalungun rasio efisiensi pajak daerah Kabupaten Simalungun tahun 2013–2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,03% dan masuk dalam kategori sangat efisien. Rasio derajat kontribusi BUMD Kabupaten Simalungun tahun 2013–2022 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 11,44% atau dapat dikatakan bahwa kontribusi BUMD berkontribusi rendah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data yang terbatas pada periode tertentu, sehingga hasil analisis mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan indikator-indikator tertentu, sehingga aspek lain yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan belum sepenuhnya terungkap. Untuk riset selanjutnya, disarankan supaya memakai data yang lebih banyak serta mencakup periode yang lebih panjang serta mempertimbangkan berbagai indikator tambahan yang relevan. Penelitian mendatang juga bisa menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Simalungun.

Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun adalah mengoptimalkan retribusi daerah dengan mempercepat penyusunan PERDA, menyesuaikan tarif retribusi dengan



perkembangan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan pariwisata dan potensi sumber daya yang ada. Selain itu, perlu tindakan dalam meningkatkan mutu dan kinerja keuangan daerah, khususnya mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menaikkan tingkat kemudahan dalam penyediaan air minum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, P. (2023). Tingkat Kejahatan dan Laka Lantas Masih Meningkat di Kabupaten Simalungun. *Mata Telinga*. <https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/tingkat-kejahatan-dan-laka-lantas-masih-meningkat-di-kabupaten-simalungun/all>
- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- BPK. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022*. <https://sumut.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan/lkpd/lkpd-kabupaten-simalungun/>
- BPS. (2022). Indeks Pembangunan Manusia. *Badan Pusat Statistik*, 73, <https://news.ge/anakliis-portiaris-qveynis-momava>.
- BPS Kabupaten Simalungun. (2024). IPM 2018-2022. *BPS Kabupaten Simalungun*. <https://simalungunkab.bps.go.id/indicator/26/106/1/ipm.html>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, A. (2023). *SSGI 2023: Angka Stunting di Kabupaten Simalungun Turun dari 28% jadi 17,4%*. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/555231/ssgi-2023-angka-stunting-di-kabupaten-simalungun-turun-dari-28-jadi-174>
- Latifatus Sakinah, B. S. (2021). Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Empat Kabupaten Di Madura 2015-2019. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(2), 249–271. <https://doi.org/10.21107/bep.v2i2.13878>
- Sakinah, L., & Satriawan, B. (2021). Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Empat Kabupaten Di Madura 2015-2019. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(2), 249–271. <https://doi.org/10.21107/bep.v2i2.13878>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Manurung, R. P. (2023). Usai Covid-19, Angka Kemiskinan di Kabupaten Simalungun Turun. *Mistar.Id*. <https://mistar.id/simalungun/usai-covid-19-angka-kemiskinan-di-kabupaten-simalungun-turun/#:~:text=Mengutip data BPS%2C angka kemiskinan,turun menjadi 8%2C26 persen>
- Maulina, S. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan APBD Tahun 2020 Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Langsa Provinsi Aceh. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8788>
- Nasution, H. J. (2022). Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia*, 24(3), 25–32. <https://doi.org/10.51510/polimedia.v24i3.451>
- Nurul Sukma Handayani. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, (3)1, 1–12. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i1.22>
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112. <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>



- Puspitasari, E., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/10198>
- Reza Vendra. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, *Jurnal Ikrath-Ekonomika*, 4, 403–416. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/113738
- Richter, L. E., Carlos, A., & Beber, D. M. (2016). Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba. *Repository Universitas HKBP Nommensen*. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2562>
- Sari, I. I., & Yousida, I. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1), 129–142. <https://doi.org/10.35972/jieb.v5i1.264>
- Siahaan, R. J. E. (2023). Angka Pengangguran Capai 5,51 Persen, Disnaker Simalungun Sosialisasi Rekrutmen Tenaga Kerja. *Mistar.Id*. https://mistar.id/simalungun/angka-pengangguran-capai-551-persen-disnaker-simalungun-sosialisasi-rekrutmen-tenaga-kerja/#google_vignette
- Silitonga, I. M., Siahaan, S. B., & Purba, S. (2022). Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 222–235. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i2.607>
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Sri Hartati, Y. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 19–29. <https://doi.org/10.55049/jeb.v14i2.116>
- Sucianti, Pahmi, Nurdin Latief, & Indah Syamsuddin. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 40–46. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.3067>
- Susilawati, D., & Wardana, L. K. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Tarigan, W. J., Purba, D. S., & Sinaga, M. H. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Pengeluaran Daerah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ecogen*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v6i1.14474>
- Widodo, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan Variabel Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintahan Provinsi Tahun 2015-2019. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 169–187. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i1.86>
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2016). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.49>
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>

